

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019



BPTP Balitbangtan Sumatera Barat
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2019

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Sumatera Barat yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Pertanian disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 yang mengamanatkan tentang instansi pemerintah wajib menyusun LAKIP disetiap akhir tahun anggaran, sesuai keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian No. 1612006, BB Pengkajian mengemban mandat membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengembangan dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan Balai/ Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (B/LPTP). Oleh karena itu, BB Pengkajian juga berkewajiban untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja BPTP secara keseluruhan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini disampaikan terimakasih. Harapan kami, semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi BB Pengkajian dan BPTP dalam perbaikan kinerja kedepan.

Sukarami, Januari 2020
Kepala Balai,

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417 199403 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP ini dibuat dan disampaikan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan diseminasi tahun anggaran 2019 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sumatera Barat yang merupakan salah satu instansi pemerintah.

Pada tahun anggaran 2019, kegiatan penelitian, pengkajian dan diseminasi yang dilaksanakan BPTP Sumatera Barat mendapat dukungan pendanaan APBN melalui DIPA BPTP Sumatera Barat, DIPA BBP2TP dan DIPA Badan Litbang Pertanian.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari satu program utama, yaitu: Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan, dengan sub program Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian dengan 8 kegiatan utama, yaitu: 1) Teknologi spesifik lokasi; 2) Diseminasi dan penyiapan teknologi untuk dimanfaatkan pengguna; 3) Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian; 4) Model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi; 5) Benih padi; 6) Layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian; 7) Koordinasi manajemen pengkajian dan 8) Jejaring/kerjasama pengkajian teknologi pertanian yang terbentuk.

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) masukan (input) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan penelitian, pengkajian, diseminasi dan kegiatan lain sebesar 100%, sedangkan realisasi keluaran output secara keseluruhan mencapai 89,45%, sedangkan persentase pencapaian rencana (target) realisasi keuangan termasuk relative tinggi, yaitu mencapai 89,88%.

Tercapainya realisasi ini disebabkan antara lain: 1) kerjasama yang baik antara peneliti, penyuluh, litkayasa dan seluruh staf administrasi/ keuanganan BPTP Sumatera Barat; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala; 3) Terintegrasinya beberapa kegiatan seperti (1) Teknologi spesifik lokasi; (2) Diseminasi dan penyiapan teknologi untuk dimanfaatkan pengguna; (3) Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian; (4) Model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi; (5) Benih padi; (6) Layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian; (7) Koordinasi manajemen pengkajian dan (8) Jejaring/kerjasama pengkajian teknologi pertanian yang terbentuk, serta 4) Perhatian serta dukungan yang tinggi dari Kepala BPTP Balitbangtan Sumatera Barat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaannya kinerja instansi suatu pemerintahan juga memerlukan adanya evaluasi. Evaluasi dilakukan sebagai suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi dan manfaat aktifitas serta program suatu instansi pemerintah. Evaluasi tersebut juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara- cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi ini merupakan perkembangan dari suatu review atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan pengumpulan data melalui riset terapan (applied research) sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pola pendekatan yang demikian akan mendukung simpulan hasil evaluasi yang lebih menyeluruh (makro) sehingga dapat menghindari resiko bias yang lebih besar. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan, rencana, standar, atau benchmark tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang di observasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. System pengukuran kinerja yang di desain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu dari bentuk evaluasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada tahun anggaran tahun 2018 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di lingkungan pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPTP Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2016 merupakan LAKIP tahun pertama Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan tahun awal penuntasan kinerja tahun 2015-2019. LAKIP BPTP Sumbar yang disusun mengacu pada peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No. Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tantang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian. Fungsi LAKIP antar lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Sumbar menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud

transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 Tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan kepada seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib membuat laporan LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbarui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk Teknis dari Inpres tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Rider Dale (2004), evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara evaluasi sumatif dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari suatu program secara keseluruhan. Adapun LAKIP adalah suatu kegiatan untuk menilai konsep dari suatu program serta desain manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Menurut Azwar Abubakar, bahwa SAKIP merupakan integrasi dari suatu perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan system Akuntabilitas Keuangan. Output SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan Kinerja yang dicapai oleh suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang di biayai oleh APBN/APBD.

Evaluasi untuk penilaian LAKIP meliputi 5 komponen yaitu adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan (kinerja bobot 35), pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran (bobot 20), pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja (bobot 15), evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi (bobot 10), dan pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya (bobot 20), nilai tertinggi dari evaluasi

LAKIP adalah AA (memuaskan) skor 85-100, sedangkan A (sangat baik) skor 75-85, B(baik) skor 65-75, CC (cukup baik) skor 50-65, C (agak kurang) skor 30-50, D (kurang) skor 0-30.

1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi Balai Pengkajian Teknologi dan Pertanian Sumatera Barat.

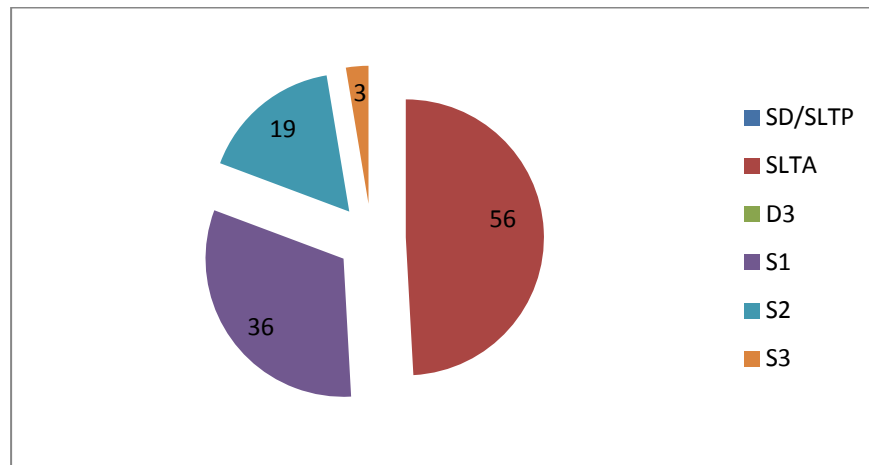
BPTP Sumatera Barat merupakan lembaga pengkajian regional yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Sedangkan fungsinya adalah: (1) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (2) Pelaksanaan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (3) Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian, serta perakitan materi penyuluhan pertanian; (4) Pelaksanaan administrasi kerjasama, diseminasi, promosi, dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil-hasil penelitian dan pengkajian spesifik lokasi; (5) Pemberian pelayanan terhadap kegiatan pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; dan (6) Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) tersebut, BPTP Sumatera Barat bertugas menyediakan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan pertanian daerah. Teknologi pertanian tepat guna yang dihasilkan bersifat spesifik lokasi, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam secara dinamis, dan dapat memanfaatkan sumberdaya pertanian secara efektif dan efisien, serta berdaya saing tinggi.

Struktur Organisasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian adalah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 Tanggal 11 Maret 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Pimpinan tertinggi adalah Kepala Balai, membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP), Kasubag TU membawahi urusan Kepegawaian, Rumah tangga dan Perlengkapan, Pengkajian, Kasubsie Monev Pelaporan, Kasubsie Perpustakaan, Website dan Publikasi, sementara itu Koordinasi Program dan Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung di bawah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

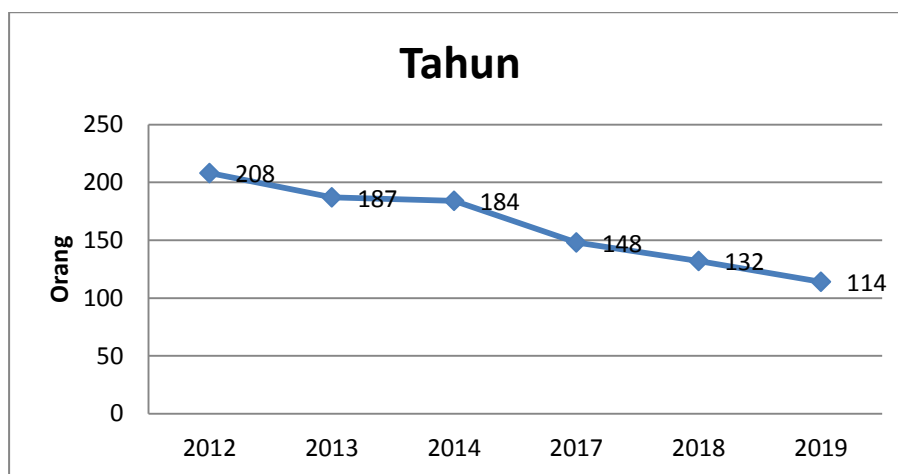
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sumatera Barat pada saat ini mengelola 114 pegawai. Menurut jenjang pendidikan masih didominasi oleh tingkat

SLTA sebanyak 56 orang berikutnya yaitu pada tingkat S1 sebanyak 36 orang, S2 sebanyak 19 orang, S3 sebanyak 3 orang.



Gambar 1. Sumberdaya manusia BPTP Sumatera Barat berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pada tahun 2019 jumlah jabatan fungsional peneliti sebanyak 26 orang, calon peneliti 2 orang, penyuluh 14 orang, dan calon penyuluh 1 orang. Secara umum jumlah sumberdaya manusia kurang proporsional antara peneliti dan penyuluh dengan non peneliti dan penyuluh. Kebijakan Badan Litbang Pertanian, Balai Besar pengkajian dan BPTP Balitbangtan Sumatera Barat secara bertahap, telah mengarahkan dan memfasilitasi bagi calon peneliti/ penyuluh untuk segera menjadi pejabat peneliti dan penyuluh melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dasar fungsional. Ke depan, pengembangan sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pengkajian dan diseminasi, mesti mempertimbangkan trend pertumbuhan SDM yang tampak sebagai berikut



Gambar 2. Trend Jumlah Pegawai Lingkup BPTP Sumatera Barat, 2012-2019

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

BPTP Sumatera Barat adalah instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Pertanian, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari BPTP Sumatera Barat, BPTP Sumatera Barat memiliki visi, adapun Visi dari BPTP Sumatera Barat tersebut yaitu:

Sebagai lembaga pengkajian, penelitian dan perakitan paket teknologi pertanian regional yang handal dalam inovasi serta pengembangan dan alih teknologi pertanian tepat guna berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan.

2.2 Misi

Untuk menciptakan visi tersebut BPTP Sumatera Barat memiliki beberapa Misi adapun Misi BPTP Sumatera Barat tersebut, yaitu:

1. Mengidentifikasi kebutuhan dan menghimpun informasi teknologi pertanian dari berbagai sumber untuk direkayasa menjadi paket teknologi tepat guna spesifik lokasi.
2. Mengembangkan teknologi yang sesuai dan memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani.
3. Mempercepat proses alih teknologi kepada para petani dan pengguna lainnya.

2.3 Tujuan

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi, mengkarakterisasi dan menghasilkan teknologi pemanfaatan potensi sumberdaya tanah/lahan, air dan agroklimat secara optimal mendukung sistem pertanian industrial daerah.
2. Menghasilkan dan mendesiminasikan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi dan strategis untuk meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk unggulan pertanian daerah.
3. Mengeksplorasi, mengidentifikasi, mengkarakterisasi, mengkonservasi dan meningkatkan manfaat potensi sumberdaya genetik pertanian spesifik lokasi.
4. Menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial, ekonomi, dan rekayasa kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis dan pembangunan daerah.

5. Merancang dan membangun model pengembangan agribisnis berbasis komoditas agroekosistem dan atau wilayah yang didukung dengan teknologi dan strategi.
6. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, ketersediaan dan pemberdayaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis.

2.4 Kegiatan

Tabel 1. Kegiatan BPTP Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019

Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan
Teknologi Spesifik Lokasi	- In house 1. Kajian Paket Teknologi Produksi Lipat Ganda Bawang dan Cabe di Sumbar 2. Integrasi Ubi Jalar, Jagung dan Ternak Sapi Menuju Usaha Pertanian Bebas Limbah dan Menghasilkan Bioproduk Bermutu di Sumatera Barat
Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna	- Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian 1. Diseminasi Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Pembangunan Pertanian Sumatera Barat 2. Taman Agro Inovasi Mart (Tagrimart)
Koordinasi, bimbingan dan dukungan teknologi UPSUS, komoditas strategis, TSP, TTP dan Bioindustri	Koordinasi, bimbingan dan dukungan teknologi UPSUS, komoditas strategis, TSP, TTP dan Bioindustri
Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan	1. Pendampingan dan Supervisi Siwab 2. Pengembangan model pembibitan ayam KUB (inti plasma) a. Pengembangan model pembibitan ayam KUB (inti) b. Pengembangan model pembibitan ayam KUB (plasma) 3. Pengembangan ayam kampung unggul berbasis rumah tangga
SDG yang terkonservasi dan terdokumentasi	SDG yang terkonservasi dan terdokumentasi
Peningkatan Inovasi Teknologi Pertanian utk Peningkatan IP	1. Pengembangan Padi Gogo Model Larigo Super Pada Lahan Kering di Sumbar 2. Penerapan Inovasi Teknologi Pada Lahan Rawa Sawah Bukaan Baru 3. Pengembangan pola tanam Tanaman Pangan
Peningkatan Komunikasi, koordinasi dan diseminasi hasil inovasi Teknologi badan litbang pertanian	Peningkatan Komunikasi, koordinasi dan diseminasi hasil inovasi Teknologi badan litbang pertanian
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	Analisis Kebijakan Pertanian di Sumatera

Pertanian	Barat
Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Model Bioindustri Berbasis Sapi Sawit di KP Sitiung 2. Implementasi Model Bioindustri Berbasis Tanaman Pisang Mendukung Diversifikasi Pangan Di Sumatera Barat
Produksi Benih Sumber Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Benih Sumber Padi FS 2. Produksi Benih Sumber Padi SS 3. Produksi benih padi ES
Layanan Perencanaan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Program dan Anggaran 2. Layanan Pelaporan dan Evaluasi
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Umum Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Peningkatan Kapasitas SDM dan ISO 2. Reakreditasi Laboratorium
Koordinasi Manajemen Pengkajian [Base Line]	Koordinasi Manajemen Pengkajian [Base Line]
Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Manajemen Keuangan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian 2. Layanan manajemen Sistem Akuntansi Indonesia 3. Layanan Manajemen UAPPA/BW 4. Layanan Manajemen Kepegawaian 5. Layanan Manajemen Perpustakaan dan Website 6. Layanan Manajemen SPI
Jejaring/ Kerjasama pengkajian tek. pertanian yang terbentuk [Base Line]	Jejaring/ Kerjasama pengkajian tek. pertanian yang terbentuk [Base Line]
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jekvy Hendra

Jabatan : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 2 Desember 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry

Jekvy Hendra

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT

1	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	13 paket teknologi
		2. Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%)	100 %
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	1 rekomendasi kebijakan
2	Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP Sumatera Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat	3 Nilai IKM

KEGIATAN

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi
 Teknologi Pertanian

ANGGARAN

Rp. 22.472.352.000

Bogor, 2 Desember 2019

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kepala Balai Pengembangan Teknologi
 Pertanian Sumatera Barat

Fadjry Djufry

Jekvy Hendra

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat. Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019 BPTP Balitbangtan Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2019

Indikator Kinerja	Target di dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi	Persentase (%)
Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	13 paket teknologi	13 paket teknologi	100
Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan	100 %	100 %	100
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat	3 Nilai IKM	3 Nilai IKM	100

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2017 telah tercapai sebesar 100% terealisasi 13 paket teknologi, 100% rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan yaitu 2019, 1 rekomendasi kebijakan dan 3 nilai IKM atas layanan publik BPTP Sumatera Barat. Dan dapat dikatakan berhasil.

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2019 dengan Target Renstra 2015-2019

Dalam tahun anggaran 2019, BPTP Sumbar telah memiliki sasaran strategis yang akan dicapai yaitu:

1. Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi
2. Terdiseminaskannya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi
3. Terlaksananya kegiatan strategis nasional/ daerah melalui pendampingan oleh BPTP
4. Terlaksananya kerjasama pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi pertanian
5. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung pembangunan pertanian
6. Dihasilkannya sinergi operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi
7. Tersedianya benih sumber mendukung sistem perbenihan
8. Tersedianya model pengembangan inovasi teknologi pertanian bioindustri

Selanjutnya delapan sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 5 indikator kinerja output, berupa: 1. Jumlah teknologi spesifik lokasi, 2. Jumlah teknologi yang termanfaatkan, 3. Jumlah rekomendasi kebijakan, 4. Jumlah model pengembangan inovasi pertanian bioindustri, 5. Jumlah produksi benih padi, 6. Jumlah layanan humas, 7. Jumlah laporan koordinasi manajemen pengkajian dan 8. Jumlah dokumen kerjasama yang terbentuk

Capaian kinerja TA 2019 dengan target Renstra 2015-2019 dari BPTP balitbangtan Sumatera Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 3. Capaian kinerja TA 2019 dengan target Renstra 2015-2019 dari BPTP balitbangtan Sumatera Barat

Indikator Output	Target Renstra	Persentase (%)
Jumlah teknologi spesifik lokasi	Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi	100
Jumlah teknologi yang termanfaatkan	Terdiseminaskannya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi	100
Jumlah rekomendasi kebijakan	Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung pembangunan pertanian	100
Jumlah model pengembangan inovasi pertanian bioindustri	Tersedianya model pengembangan inovasi teknologi pertanian bioindustri	100

Jumlah produksi benih padi	Tersedianya benih sumber mendukung sistem perbenihan	90
Jumlah layanan Humas	Terlaksananya kegiatan strategis nasional/ daerah melalui pendampingan oleh BPTP	100
Jumlah laporan koordinasi manajemen pengkajian	Dihasilkannya sinergi operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi	100
Jumlah dokumen kerjasama yang terbentuk	Terlaksananya kerjasama pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi pertanian	100

Berdasarkan jumlah indikator output yang telah tercapai 100% dan capaian kinerja terhadap renstra 2015-2019 maka realisasi output yang dihasilkan dapat dikatakan berhasil.

3.1.3 Keberhasilan, kendala dan Langkah Antisipasi

Dukungan yang besar dari dinas/instansi terkait baik di pusat maupun di daerah merupakan salah satu faktor penyebab keberhasilan capaian pada realisasi ini. Selain besarnya perhatian dan dukungan dari Kepala BPTP Sumatera Barat dan Unit Kerja di lingkup BPTP Sumatera Barat kepada tim pelaksana kegiatan sampai pelaporan hasil kegiatan juga merupakan faktor penting penyebab tingginya capaian ini. Kondisi yang kondusif ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang melalui konsistensi dalam menjalankan segala ketentuan, komitmen dan keijakan yang telah disepakati bersama. Keberhasilan, kendala dan langkah antisipasi dalam pelaksanaan mencapai output disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Output, keberhasilan, kendala dan langkah antisipasi

No	Nama Output	Keberhasilan (%)	Kendala	Langkah Antisipasi
1	Teknologi Spesifik Lokasi	100	Tidak ada kendala	-
2	Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna	100	Tidak ada kendala	-
3	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	100	Tidak ada kendala	-
4	Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	100	Tidak ada kendala	-
5	Benih Padi	90	Kemampuan menguasai gabah kering panen dari mitra kerja tidak mencukupi sesuai dengan alokasi anggaran	Meningkatkan kemampuan menguasai gabah kering panen
6	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	100	Tidak ada kendala	-
7	Koordinasi Manajemen	100	Tidak ada kendala	-

	Pengkajian			
8	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	75	Anggaran masih terblokir hingga akhir tahun (TTP)	Sudah dilakukan pendekatan dan peninjauan pelaksanaan administrasi pembelian lahan TTP Guguak dengan BPN, pemilik tanah, dan telah selesai dilakukan penilaian oleh Tim Appraisal, namun dari segi anggaran masih belum bisa di realisasikan karena masih terblokir sampai akhir anggaran tahun 2019. Diharapkan dapat di realisasikan tahun 2020
9	Layanan Dukungan Manajemen Satker	100	Tidak ada kendala	-
10	Layanan Perkantoran	100	Tidak ada kendala	-

3.1.4 Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang dicapai adalah mengenai internal satker yaitu dengan indikator output: 1. Jumlah dukungan manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi, 2. Jumlah layanan manajemen satker dan 3. Jumlah paket layanan perkantoran

Tabel 4. Capaian kinerja lainnya dari BPTP Sumatera Barat

Indikator Output	Target	Realisasi	Persentase (%)
Jumlah dukungan manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi	1 layanan	1 layanan	100
Jumlah layanan dukungan manajemen satker	1 layanan	1 layanan	100
Jumlah paket layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100

Berdasarkan jumlah target dengan persentase yang 100% maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut berhasil.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Realisasi keuangan

BPTP Sumatera Barat memiliki sumber dana Tahun Anggaran 2019 yang berasal dari Rupiah murni sebesar Rp 21.865.504.000,-; PNBP Tahun Anggaran berjalan yaitu sebesar Rp 406.848.000,- dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 200.000.000,- dengan total anggaran pada TA. 2019 yaitu Rp 22.472.352.000, dari total anggaran tersebut penyerapan anggaran yang berhasil diserap yaitu sebesar Rp 20.198.488.451,- dengan persentase sebesar 89,88%, realisasi tersebut terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp 9.704.276.757,-

3.2.2 Pengelolaan PNBP

Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) besaran realisasi yang di hasilkan BPTP Sumatera Barat yaitu sebesar Rp 649.923.206,- dengan estimasi PNBP tahun 2019 sebesar Rp 529.850.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi PNBP sampai dengan Desember 2019

No	Uraian	Estimasi PNBP Tahun ini (Rp)	Realisasi Penyetoran s/d bulan ini		Sisa estimasi PNBP (Rp)
			Jumlah (Rp)	%	
1	Penerimaan Umum	68.100.000	221.736.288	325,60	(153.636.288)
2	Penerimaan Fungsional	461.750.000	423.593.100	91,74	38.156.900
	Jumlah (1+2)	529.850.000	645.329.388	121,79	(115.479.388)
3	Pengembalian Belanja	0	4.593.818		(4.593.818)
	Total (1+2+3)	529.850.000	649.923.206	122,66	(120.073.206)

Keterangan: Tanda () menyatakan telah melebihi target

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dinyatakan bahwa realisasi PNBP BPTP Sumatera Barat telah lebih dari estimasi PNBP yaitu sebesar 122,66%, dengan kelebihan realisasi Rp 120.073.206,-.

IV. PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Pada tahun 2019, alokasi anggaran meliputi kegiatan penelitian, pengkajian dan diseminasi mendapat dukungan pendanaan dari APBN melalui DIPA BPTP Sumatera Barat, DIPA BBP2TP dan DIPA Badan Litbang Pertanian. Kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari satu program utama, yaitu: Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan, dengan sub program Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian dengan 8 kegiatan utama, yaitu: 1) Teknologi spesifik lokasi; 2) Diseminasi dan penyiapan teknologi untuk dimanfaatkan pengguna; 3) Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian; 4) Model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi; 5) Benih padi; 6) Layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian; 7) Koordinasi manajemen pengkajian dan 8) Jejaring/kerjasama pengkajian teknologi pertanian yang terbentuk.

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) masukan (input) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan penelitian, pengkajian, diseminasi dan kegiatan lain sebesar 100%, sedangkan realisasi keluaran output secara keseluruhan mencapai 89,45%, sedangkan persentase pencapaian rencana (target) realisasi keuangan termasuk relative tinggi, yaitu mencapai 89,88%.

4.2 Langkah- langkah Peningkatan Kinerja

Tercapainya realisasi capaian kinerja instansi tersebut disebabkan antara lain: 1) kerjasama yang baik antara peneliti, penyuluh, litkayasa dan seluruh staf administrasi/keuangan BPTP Sumatera Barat; 2) kegiatan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dan berkala; 3) Terintegrasinya beberapa kegiatan seperti (1) Teknologi spesifik lokasi; (2) Diseminasi dan penyiapan teknologi untuk dimanfaatkan pengguna; (3) Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian; (4) Model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi; (5) Benih padi; (6) Layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian; (7) Koordinasi manajemen pengkajian dan (8) Jejaring/kerjasama pengkajian teknologi pertanian yang terbentuk, serta 4) Perhatian serta dukungan yang tinggi dari Kepala BPTP Balitbangtan Sumatera Barat.